

# Zero Emission di Ibu Kota Negara

Policy Note - Volume 3  
April 2021



Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur bukan lagi sekedar wacana. Tanggal 22 - 23 April 2021, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (MPPN) melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur dalam rangka melakukan peninjauan terhadap kesiapan Ibu Kota Negara (IKN) serta mendengar *sharing* pandang dari Pemerintah Daerah, Akademisi serta Tokoh Masyarakat terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Dalam acara *sharing* pandang tersebut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (MPPN) menyampaikan bahwa ada empat alasan mengapa Ibu Kota Negara akhirnya diputuskan pindah ke Penajam Paser Utara yaitu (1) Heterogenitas di Kalimantan Timur untuk suku bangsa dan ras sangat tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain; (2) Diluar Jakarta, daerah yang terkaya yang dihitung dari PDRB perkapitanya adalah Kalimantan Timur; (3) Kalimantan Timur memiliki banyak keunggulan yang perlu dieksploitasi sehingga dibutuhkan peran dari

Perguruan Tinggi untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait potensi dan keunggulan yang dimiliki; dan (4) Adanya resedensial kelas menengah dan menengah atas, hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan-perusahaan dan group-group besar dari Jakarta sudah berani masuk ke Kalimantan Timur, kondisi ini menunjukkan bahwa daya beli di Kalimantan Timur cukup besar.

Hal penting lainnya yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (MPPN) adalah terkait pelestarian lingkungan dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Kalimantan Timur diharapkan dapat bergerak menuju *zero emission*. Konsep *zero emission* sendiri menyatakan bahwa proses industri seharusnya tidak menghasilkan limbah dalam bentuk apapun. Sebab, limbah berdampak buruk terhadap lingkungan, termasuk manusia. Artinya, produksi sampah dari suatu industri sebisa mungkin harus diminimalkan.<sup>1</sup>

Menteri Perencanaan Pembangunan (MPPN) memastikan bahwa cara membangun Ibu Kota Negara (IKN) nantinya tidak lagi didasarkan pada cara-cara lama, melainkan dengan memperkaya dan memperhitungkan emisi gas. Kunci untuk menurunkan emisi adalah dengan menghentikan penggunaan energi fosil dan beralih ke energi terbarukan dan ramah lingkungan.<sup>ii</sup> Sementara itu, pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim saat ini telah menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah telah berkomitmen akan menurunkan emisi sebesar 29 persen pada 2030.<sup>iii</sup>

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (MPPN) menegaskan bahwa listrik di Ibu Kota Negara (IKN) nantinya diarahkan untuk tidak lagi menggunakan batu bara melainkan menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti tenaga air, angin, matahari dan sampah.<sup>iv</sup> Gubernur Kalimantan Timur diminta secara tegas untuk melarang penggunaan plastik/botol plastik dengan mengeluarkan peraturan daerah terkait hal tersebut.

Kebijakan ini tentunya merupakan kebijakan yang sangat tepat jika ingin menjadikan Kalimantan Timur sebagai *leader* Indonesia untuk *zero emission* dan membuktikan kepada dunia bahwa Ibu Kota Negara (IKN) dan wilayah di sekitar IKN adalah wilayah yang *respect* terhadap lingkungan hidup, dapat melestarikan hutan, menghijaukan kembali hutan-hutan yang rusak serta dapat menjaga semua habitat satwa.

Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan berbagai strategi yang tepat yaitu dengan membagi porsi antara ruang terbuka hijau, ruang terbangun serta area yang dilindungi. Pembagian zona yang mendukung konsep “berjalan kaki dengan nyaman” serta konektivitas sosial di Ibu Kota Negara (IKN) juga menjadi hal yang penting untuk direncanakan. Penyediaan fasilitas angkutan umum massal serta kendaraan listrik seperti mobil dan sepeda motor untuk mobilitas masyarakat di IKN nantinya dapat menjadi alternatif yang tepat guna mendukung konsep *Zero Emission*.

Akan menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk dapat berkomitmen memanfaatkan 100 persen energi terbarukan di Ibu Kota Negara (IKN) guna mendukung pengembangan energi terbarukan dan *Zero Emission*.

*Penulis: Dian Maria Andriani, ST. MT. M. Si (Han)  
Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja  
Email: pak@bappenas.go.id*

---

<sup>i</sup> <http://news.unair.ac.id/2018/11/07/seminar-teknik-lingkungan-unair-bahas-zero-emission-di-indonesia/>

<sup>ii</sup> Emil Salim dalam Indonesia Net Zero Summit 2021 yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), secara daring, Selasa (20/4/2021).

<sup>iii</sup> Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Suharso Monoarfa dalam Indonesia Net Zero Summit 2021 yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), secara daring, Selasa (20/4/2021).

<sup>iv</sup> Hasil Kunjungan Kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (MPPN) di Kalimantan Timur tanggal 22 - 23 April 2021.